

RINGKASAN

**Mariah
NIM 200510130** **Penegakan Tindak Pidana Kasus Penebangan Liar Di Kecamatan Putri Betung (Studi Penelitian Kabupaten Gayo Lues)**

(Ferdy Saputa, S.H., M.H., dan Arif Rahman, S.H., M.H.)

Penebangan liar, sebagai tindak pidana yang merusak norma sosial dan menghabat terjadinya pelestarian lingkungan, harus dicegah dan diberantas. Penebangan liar tidak hanya bertentangan dengan hukum dan moral, tetapi juga ketergantungan dan kerugian materiil. Dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidikan sebagai penyebab utama, upaya dalam penebangan liar dilakukan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya kehutanan dan lingkungan hidup sosial. Undang-undang yang mengatur penebangan liar, yaitu Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menetapkan hukuman untuk pelaku penebangan liar dan pihak yang terlibat dalam melakukannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penebangan liar di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues ditinjau dari perspektif penegakan tindak pidana penebangan liar dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penebangan liar dan hambatan penanggulangan penebangan liar di Kabupaten Gayo Lues.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data.

Penebangan liar di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, melibatkan isu yang serius dan berdampak negative pada lingkungan serta kehidupan masyarakat setempat. Hutan di daerah ini kaya akan keanekaragaman hayati dan berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang penting, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat lokal, serta program reboisasi dan konservasi hutan. Penebangan liar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur lebih rinci mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penebangan liar, termasuk sanksi pidana bagi pelaku perusakan hutan.

Disarankan kepada pihak berwenang dan masyarakat di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaku penebangan liar dan tidak memberikan izin terhadap masyarakat untuk membuka lahan.

Kata Kunci : Penegakan, Tindak Pidana, Penebangan Liar.

SUMMARY

**Mariah
NIM 200510130**

Enforcement of Criminal Actions in Illegal Logging Cases in Putri Betung District (Research Study in Gayo Lues District)

(Ferdy Saputa, S.H., M.H. and Arif Rahman, S.H., M.H.)

Illegal logging, as a criminal act that damages social norms and hinders environmental conservation, must be prevented and eradicated. Illegal logging is not only against the law and morals, but also against dependency and material losses. With factors such as poverty, unemployment, and lack of education as the main causes, efforts in illegal logging are carried out to increase the community's legal understanding of the importance of forestry and the social environment. The law that regulates illegal logging, namely Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, stipulates penalties for perpetrators of illegal logging and those involved in carrying it out.

This research aims to determine illegal logging in Putri Betung District, Gayo Lues Regency from the perspective of enforcing criminal acts of illegal logging and to determine the factors that cause illegal logging and obstacles to overcoming illegal logging in Gayo Lues Regency.

This research method uses empirical juridical research methods with a literature and field research approach. Literary research was carried out to obtain theoretical data, while field research was carried out through interview techniques to collect data.

Illegal logging in Putri Betung District, Gayo Lues Regency, involves serious issues and has a negative impact on the environment and the lives of local communities. Forests in this area are rich in biodiversity and function as important ecosystem buffers. Mitigation efforts that can be taken include increasing supervision and law enforcement, empowering local communities, as well as reforestation and forest conservation programs. Illegal logging is regulated in several laws and regulations, namely Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction regulates in more detail regarding efforts to prevent and eradicate illegal logging, including criminal sanctions for perpetrators of forest destruction.

It is recommended to the authorities and the community in Purti Betung District, Gayo Lues Regency to increase supervision of illegal logging perpetrators and not give permission to the community to clear land.

Keywords: *Enforcement, Crime, Illegal Logging..*